

Suara Perempuan di Panggung Politik: Pengungkapan Histories Profile dan Kiprah Andi Ruadah Mappiwali, 2014

Online Journal System (OJS):
ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB

Ashari 

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Abstract: Partisipasi perempuan dalam pembangunan adalah peran yang dipahami memiliki urgensi dan makna kedirian yang tinggi. Peran perempuan, adalah peran yang bermartabat, peran yang memiliki simbol, yang menunjukkan kiprah perempuan dalam berbagai peran. Dalam kaitan demikian, riset ini menggunakan metode penelitian sosio histories. Dengan menggunakan metode sosiohistories demikian, maka kajian ini, mempermaklumkan: Andi Ruadah Mappiwali adalah sosok perempuan yang penuh pengaruh, berdedikasi berasal Bulukumba, yang memiliki latar belakang keluarga bangsawan dan pengalaman luas dalam bidang pemerintahan dan organisasi. Andi Ruadah Mappiwali, pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dan aktif dalam berbagai organisasi, termasuk Partai Golkar. Spirit utama terjun dalam dunia politik adalah untuk memperjuangkan hak perempuan. Dalam pandangannya, keberhasilan dalam pembangunan, diawali dari kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Kata Kunci: perempuan, panggung politik, partisipasi

Abstrak: *Women's participation in development is a role that is understood to have urgency and high selfhood. The role of women is a dignified role, a role that has symbols, which show the work of women in various roles. In this regard, this research uses the socio-historical research method. By using the sociohistories method, this study, therefore, recognises: Andi Ruadah Mappiwali is an influential, dedicated woman from Bulukumba, who has a noble family background and extensive experience in government and organisations. Andi Ruadah Mappiwali, has served as a member of the Bulukumba Regency DPRD and is active in various organisations, including the Golkar Party. The main spirit of entering politics is to fight for women's rights. In her view, success in development begins with people's awareness of their rights and obligations as citizens.*

Keywords: women, political stage, partisipation

*Received Maret 2025; accepted Mei 2025

Corresponding author:

Ashari, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri
Makassar, Indonesia.

Email: ashariismail272@gmail.com

Pendahuluan

Makassar Panggung politik perempuan merupakan setting politik, yang seringkali menghadapi problematik yang demikian kompleks. Budaya patriarki yang masih mengakar, yang memungkinkan peran gender perempuan, guna berkiprah kedalam panggung politik, sering mendapat hambatan. Walaupun demikian, tantangan ini, menjadi bagian spirit perempuan ikut dalam berkontestasi dalam pemilu sebagai peserta (Priandi, & Roisah 2019). Perempuan cukup sadar, kultur patriarki yang kuat, memungkinkan peran politik perempuan, belum menunjukkan kesetaraan dan keadilan dalam politik (Ramadhani & Rahmawati, 2020). Stereotip perempuan dalam dunia politik mengakibatkan menjadi “panggilan” tersendiri bagi perempuan (Sari, Mariyanti, & Putri 2024). Kehadiran perempuan dalam kancah politik, sebenarnya secara sosiologis historis, amat diharapkan, demi untuk “memperjuangkan” kaumnya. Wacana akan partisipasi perempuan untuk terjun dalam dunia politik sudah dari dulu didebatkan, berbagai pendapat dikemukakan mulai dari pro hingga kontra dan hal ini merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan (Bintari, 2021). Walaupun hal ini, bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan perjuangan.

Tantangan yang sangat besar dalam bidang politik adalah perempuan, “keberdayaan”. Perempuan, kurang berdaya, menghadapi berbagai “kepenerimaan, pengakuan”, untuk terjun kedalam dunia politik. Walaupun kemudian, banyak perempuan yang hadir dalam politik, dapat mampu menembus batas-batas, sebagai sosok inspiratif dalam proses pembangunan baik dalam lingkup lokal hingga nasional. Dalam jumlah yang masih kurang diperhitungkan, sejak dulu peranan perempuan telah menunjukan aktivitas politik yang demikian hebat. Keterlibatan perempuan ini, dilakukan semata-mata hanya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan menunjukan bahwa mereka mampu berkiprah dengan baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan perempuan (Nimrah & Sakaria, 2015).

Saat ini, partisipasi perempuan dalam dunia politik, didukung oleh regulasi atau aturan yang mengatur bahwa perempuan wajib ikut serta dalam politik, tidak hanya sebagai obyek pemilihan melainkan juga sebagai subyek aktif dalam peran politik (Artina, 2016). Namun demikian, aturan tentang kewajiban perempuan untuk ikut serta dalam politik, belum sepenuhnya terakomodir, karena instrumen partai politik tetap memiliki kendali kekuasaan untuk mengikutsertakan perempuan dalam partisipasi aktif politik, hal ini mengakibatkan partisipasi perempuan untuk aktif dalam politik masih sangat terbatas (Ekawati, 2017). Lepas dari hal ini, di Sulawesi selatan, tampil perempuan sosok perempuan inspiratif yaitu Andi Ruaedah Mappiwali, seorang perempuan bangsawan yang berani terjun langsung kedalam politik dan sosial kemasyarakatan.

Andi Ruaedah Mappiwali, merupakan sosok yang tidak hanya sebagai perempuan tangguh yang terjun kedalam dunia politik, melainkan juga sebagai simbol antara tradisi dan modernitas. Lahir dalam keluarga bangsawan Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengakibatkan warisan dan nilai-nilai budaya masih terbawa. Perempuan yang memiliki tekad dan komitmen yang tegas memantapkan diri untuk melangkah kedalam dunia pemerintahan dan terjun ke dunia politik dengan tujuan aspirasi rakyat terkhusus perempuan yang harus diperjuangkan. Keberadaan Andi Ruaedah Mappiwali di DPRD Kabupaten Bulukumba bukan karena proses politik semata, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap kapabilitas, integritas, dan dedikasi yang telah ditunjukkan sejak lama kepada masyarakat.

Latar belakang Andi Ruaedah Mappiwali selain dari Bangsawan Kajang, dapat dilihat dari pendidikan formal dan organisasi yang pernah diikuti. Lulus SLTA pada tahun 1969, pernah menjabat sebagai Kasi Perhubungan Pariwisata di Bappeda dan aktif dalam berbagai organisasi-organisasi lain seperti Remaja Panca Marga, ORARI Kabupaten Bulukumba, dan Ketua DPC Partai Golkar Wilayah Herlang. Selain aktif dalam organisasi, Andi Ruaedah Mappiwali juga dikenal sebagai pembina Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Herlang. Posisi tersebut memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk membina lebih banyak perempuan dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.

Selain Jabatan dan posisi yang diemban, Andi Ruaedah Mappiwali juga dikenal akan visi yang tajam dan berpihak terhadap isu-isu yang cukup panas, seperti kesetaraan gender, keadilan sosial, pemberantasan korupsi, dan masalah hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengupas lebih jauh profil Andi Ruaedah Mappiwali, bukan hanya prestasi dalam ranah politik melainkan juga sebagai perempuan yang hidup dizaman modern namun masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.

Metode Penelitian

Subyek kajian, fokus pada problematik, sosio histories. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio historis, hal mana riset sebelumnya, diredefinisi. Metode Penelitian sosio historis merupakan metode dengan menggunakan data/ konsep gabungan sosiologis – histories sebagai data ilmiah yang akan di analisis. Metode ini digunakan untuk menjelaskan kembali, secara akurat tentang apa yang telah terjadi di masa lalu dan mengapa hal tersebut terjadi. Pengungkapan kajian dilakukan dengan sistematis dimulai dari menggambarkan, kemudian menjelaskan dan memahami peristiwa atau data yang telah didapatkan (Fraenkel & Wallen dalam Khilmiyah, 2016).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Andi Ruaedah Mappiwali, adalah putri asal kabupaten Bulukumba, yang lahir pada 1950-an. Ayahnya A. Muhidin dan ibunya A.Aisyah adalah bangsawan Bulukumba yang disegani dan ditaati oleh rakyat kebanyakan. Andi Ruaedah Mappiwali, memiliki 3 (tiga) orang putra, yaitu: A. Ardiansyah, A. Sulaeman A.Md dan A. Armawali. Suaminya bernama Drs. A. Muh. Tayeb, yang memiliki jabatan sebagai Camat Herlang kabupaten Bulukumba. Saat riset ini dilakukan, beralamat JL. Dr. Muh. Hatta No.68 Kab. Bulukumba (rumah sendiri) dan desa Singa Kec. Herlang (Rumah Jabatan).

Andi Ruaedah Mappiwali, berpendidikan: SD tahun 1961, SLTP 1964, dan SLTA 1969. Sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Bulukumba --- jabatan yang pernah dijabat yaitu : Kasi Perhubungan Pariwisata Bappeda. Penghargaan yang pernah ia terima adalah : Piagam Penghargaan dari DHD 45, Bintang JSM 45 / Medali Perjuangan 45. Selain pendidikan dan jabatan yang dipegang diatas, hal lain yang banyak membentuk diri Andi Ruaedah Mappiwali adalah keaktifan dalam organisasi yaitu : Pengurus Harian Remaja Panca Marga, Pengurus ORARI Kabupaten Bulukumba. Dan yang lebih penting adalah Pengurus Partai Golkar, yakni sebagai Ketua DPC Partai Golkar Wilayah : Herlang dan pembina Dharma Wanita Persatuan Kec. Herlang. Demikian pula berbagai pelatihan yang pernah diikutinya di Jakarta, yaitu Pelatihan Depdagri 2005, Munas Advokasi di Jakarta, 2005 dan Orientasi anggota DPRD di Jakarta.

Andi Ruaedah Mappiwali, memahami bahwa keberhasilan mereka dalam meraih sukses menjadi anggota DPRD Kab. Bulukumba 2014, selain karena faktor pengalaman dalam organisasi dan jabatan yang pernah dipangku dan didudukinya. Hal lain yang membuatnya sukses adalah kharisma orang tuanya sebagai bangsawan Kajang yang masih cukup disegani dan dipanuti. Nampaknya komunitas Bulukumba --- yang sudah modern tidak meninggalkan warisan budaya mereka untuk tetap menjunjung tinggi norma/adat mereka yang termuat dalam Pasang ri Kajang. Keberadaan Andi Ruaedah Mappiwali, di DPRD dimotivasi oleh keinginan mereka untuk menyalurkan aspirasi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak kaumnya. Dan menurutnya bahwa Indonesia baru yang harus diperjuangkan agar keluar dari krisis adalah Indonesia yang warganya yang memiliki kesadaran dari WNI terhadap hak dan kewajibannya, dan berpartisipasi dalam mengisi pembangunan yang memberikan kontribusi pengabdian. Dalam hal ini, dalam pandangan Andi Ruaedah Mappiwali pokok persoalan bangsa ini agar dapat keluar dari krisis terletak pada subyek masyarakatnya, yaitu masyarakat bottom up berupaya untuk memperbaiki kondisi sendiri.

Dalam hal ini Andi Ruaedah Mappiwali, memperlakukan bahwa dalam membangun kesetaraan gender perlunya memperhatikan berbagai norma --- agama dan norma hukum--- terhadap dalam hal ini, Ibu Andi Ruaedah Mappiwali memperlakukan, dengan memahami norma hukum dan norma

agama akan dapat membawa terciptanya suatu kehidupan yang selaras dan jauh dari ketidakadilan gender.

Dalam pembangunan berbagai aspek kemasyarakatan termasuk aspek hukum budaya, sosial, Ibu Andi Ruaedah Mappiwali mengagendakan beberapa hal yang harus mendapat perhatian, yaitu dalam bidang hukum yaitu pengedepanan pembangunan hukum --- dengan asas praduga tak bersalah, pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat --- dengan berdasarkan pada asas demokrasi, dan membangun suatu komunitas masyarakat yang memiliki fondasi ekonomi yang mantap dan berwibawa. Dalam hal lain pula, Andi Ruaedah Mappiwali mengagendakan perlunya melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah menjadi patologi sosial --- maka hal yang perlu dilakukan dalam pandangan Andi Ruaedah Mappiwali adalah penegakan supremasi hukum tanpa memilih kasih, menanamkan kesadaran sebagai warga negara yang taat pada hukum. Dalam kaitan ini pula yang dipermaklumkan oleh Andi Ruaedah Mappiwali dalam membangun dan meningkatkan sumber daya perempuan adalah : dengan pelatihan, pendidikan dan kursus-kursus.

Dalam hal lain dalam pandangan Andi Ruaedah bahwa saatnya perempuan mengambil peran dalam mengisi pembangunan, baik dalam bidang pemerintah maupun politik, yang bertumpu pada tatanan politis yang bersifat demokratis. Demikian pula Andi Ruaedah --- mengemukakan dengan tegas perlunya membangun suatu komunitas sosial yang bertumpu pada : tatanan budaya – menghargai nilai-nilai luhur bangsa yang beradab; pembangunan pola pendidikan yang khusus bagi para perempuan; moral yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan; penegakan kedisiplinan dalam menjalankan tugas; dan memberikan penyuluhan tentang kesetaraan gender. Namun demikian lepas dari hal ini, hal yang cukup disesalkan oleh Andi Ruaedah Mappiwali adalah tidak diberikannya kesempatan kaum perempuan dalam bidang pemerintahan maupun diluar jajaran pemerintahan karena banyaknya aturan yang mengikat. Tidak adanya pembudayaan khusus bagi perempuan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam pembangunan. Hal-hal ini dalam, pemahaman Andi Ruaedah Mappiwali merupakan problem riil yang harus dipersoalkan dan diperjuangkan, bukan malah sebatas diperbincangkan.

Kesimpulan

Andi Ruaedah Mappiwali adalah sosok perempuan berpengaruh asal Bulukumba yang memiliki latar belakang keluarga bangsawan dan pengalaman luas dalam bidang pemerintahan dan organisasi. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dan aktif dalam berbagai organisasi, termasuk Partai Golkar, Dharma Wanita, serta ORARI. Motivasi utamanya dalam dunia politik adalah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan menyuarakan aspirasi kaumnya. Menurutnya, keberhasilan dalam pembangunan nasional harus dimulai dari kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ia menekankan pentingnya supremasi hukum, pemberantasan KKN, serta penguatan peran perempuan melalui pelatihan dan pendidikan. Ia juga mendorong pembangunan yang berlandaskan nilai budaya, agama, dan hukum, guna menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Namun, ia menyoroti hambatan struktural yang masih membatasi partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan, serta mengkritisi kurangnya ruang dan budaya khusus yang mendukung pemberdayaan perempuan. Bagi Andi Ruaedah, persoalan tersebut harus diperjuangkan secara nyata, bukan hanya menjadi wacana.

Referensi

- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 23(1).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>
- Bintari, A., (2021). Partisipasi dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*. 1(2021)

- Ekawati, E., (2017). Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca-Order Baru. *Musawa*. 16(1).
- Hasyim, S.H., & Ashari I. 2005. Profile dan Visi Para Perempuan Anggota DPR Tingkat Provinsi dan Kota/ Kabupaten Hasil Pemilu 2004 Di Sulawesi Selatan Dalam Membangun Indonesia Baru yang Berkesetaraan Gender. Makassar. FEIS. UNM.
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Nimrah, S., & Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. 1(2).
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 1(1).
- Ramadhani, D., & Rahmawati, D., E. (2020). Model Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 1(39-62).
- Sari, P., E., Mariyanti, E., & Putri, S., L. (2024). Analisis Persepsi Pemilih Terhadap Penampilan Calon dan Dampaknya Terhadap Calon Perempuan Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*. 2(1).